



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIGI**

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2025 2029



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
TATA RUANG KABUPATEN SIGI**



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
BAB I	
PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-6
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-7
BAB II	
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi	II-1
2.2. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	II-2
2.3. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten.....	II-10
2.4. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi.....	II-14
2.5. Kelompok Sasaran Layanan	II-26
2.6. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	II-27
BAB III	
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III-1
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025-2029	III-1
3.2. Penahapan Pembangunan	III-4
3.3. Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi	III-5
3.4. Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi.....	III-6



BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN WAJIB PELAYAN DASAR. IV-1
4.1.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Runag 2025-2029 IV-1
4.2.	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
4.3.	Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029IV-86
4.4.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029
4.5.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029IV-94
BAB V	PENUTUP V-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan ASN dan Non ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi Tahun 2025	II-10
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi Tahun 2025	II-11
Tabel 2.3	Jenis, Jumlah Alat Besar Yang Dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi Tahun 205-2029	II-13
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi Tahun 2021-2024	II-15
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan dan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi Tahun 2021-2024	II-24
Tabel 2.6	Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi	II-30
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029	III-2
Tabel 3.2	Pebapan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029	III-4
Tabel 3.4	Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029	III-7
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rancangan akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029	IV-4
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029	
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-87



Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten sigi Tahun 2025-2029	IV-93
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029	IV-95
Tabel 4.6	Indikator SPM dan Indikator LPPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029	IV-98



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Sigi Periode 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang memuat isu strategis, kondisi pencapaian, permasalahan dan tantangan, visi, misi dan tujuan, kebijakan dan strategi, program dan kegiatan, serta indikasi pendanaan, sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan dalam perjalanan waktu lima tahun kedepan, dan sebagai dasar penilaian atas kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan selama masa jabatan serta menjadi alat Sigi dan tolak ukur penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Disadari bahwa Renstra yang disusun oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Sigi Tahun 2025 - 2029 ini masih memerlukan penyempurnaan. Untuk itu, saran serta kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan guna lebih sempurnanya penyusunan dokumen serupa dimasa mendatang.

Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Tim Penyusun Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Sigi dan seluruh pihak yang membantu dalam proses penyusunan Renstra ini, semoga Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang ini dapat menjadi bahan evaluasi, utamanya dalam rangka peningkatan kinerja bagi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Sigi serta terwujudnya **"Kabupaten Sigi Maju, Berkelanjutan Berbasis Pertanian dan Pariwisata"**.

Sigi Biromaru, 30 September 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Sigi



Dr. Edy Dwi Saputro, ST, MM

Pembina Tkt. I, IV b

NIP. 19800112 201101 1 002

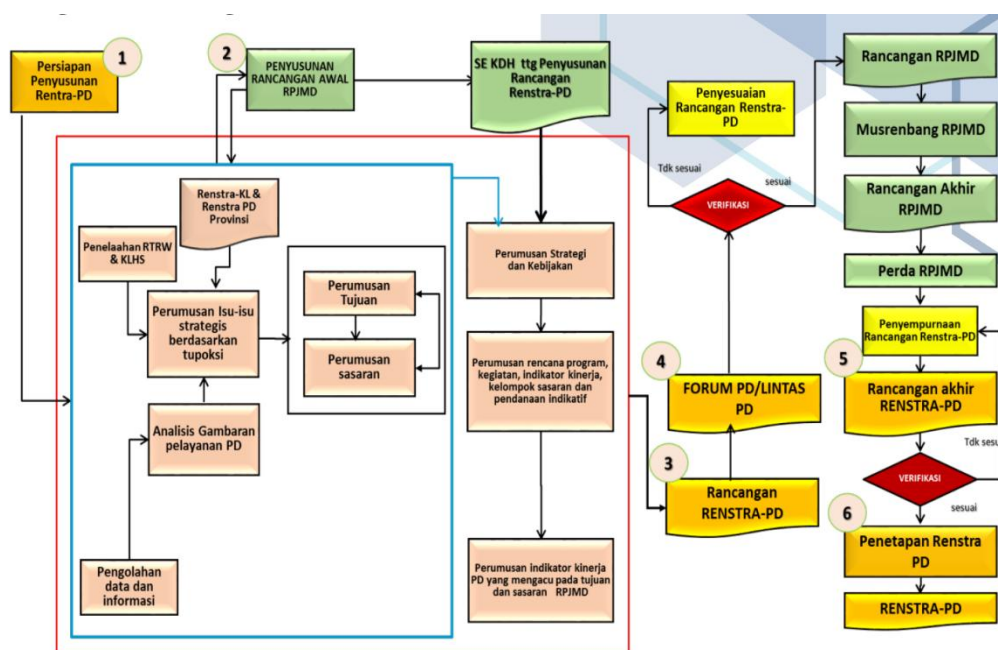


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) penetapan Renstra.



Gambar 1.1

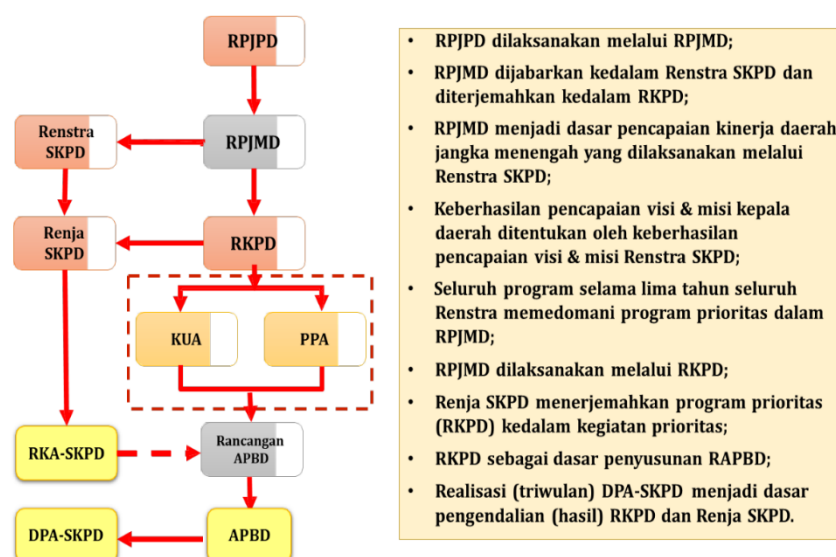
Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

Renstra Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Bina Marga dan



Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah, RPJMD Kabupaten Sigi 2025 - 2029, Dokumen KLHS Kabupaten Sigi serta SDGs. diuraikan sebagai berikut:

1. Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Kabupaten Sigi Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kelola Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Sigi; RPJMD Kabupaten Sigi 2025 – 2029, dan memperhatikan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum;
2. Penyusunan Renstra mengacu pada Renstra Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Sigi.



Renstra memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis, Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu



Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 Diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi



Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Sigi Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten Sigi Nomor 125);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 150);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi Tahun 2025 - 2029 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isi strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijaksanaan, program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi sebagai penjabaran atas RPJMD Kabupaten Sigi 2025 – 2029 sesuai tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi dalam mendukung visi dan misi Bupati;



2. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi dalam menyusun Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas pembahasan secara umum dari masing – masing bab, maka uraian sistematika penyusunan Dokumen Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN SIGI

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang Tujuan rencana strategi, Sasaran Rencana Strategi, Strategi Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra, serta arah kebijakan Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.



BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyelenggaraan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Bab ini berisi tentang Rencana Program, Sub Kegiatan Serta Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan dan Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi.

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sigi Nomor 24 Tahun 2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kelola Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi mempunyai :

A. Tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pekerjaan umum dan tata ruang serta tugas perbantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Pelaksanaan administrasi di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



2.2. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Taat Ruang Kabupaten Sigi ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Sigi Nomor 4 Tahun 2023 Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Bina Marga
4. Bidang Sumber Daya Air
5. Bidang Cipta Karya
6. Bidang Tata Ruang
7. Bidang Bina Konstruksi
8. UPTD

Berdasarkan Peraturan Bupati Sigi Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari tiga yaitu :

- a. UPTD Pengelolaan Air Minum dibentuk dengan kelas A
 - b. UPTD Peralatan dan Perbekalan dibentuk dengan kelas A
 - c. UPTD Air Limbah Domestik dibentuk dengan kelas A
9. Kelompok Jabatan fungsional

Uraian tugas dari masing – masing bidang adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat
Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berada di bawah dan bertanggung



jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai fungsi tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan operasional tugas administrasi bidang pengelolaan perencanaan, keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
- c. pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran Dinas;
- d. pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan keuangan;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana;
- g. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
- h. pengelolaan urusan kepegawaian;
- i. pengelolaan data dan informasi;
- j. pengoordinasian penyusunan laporan kinerja;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, aset, kepegawaian, dan umum;
- l. pelaporan pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, aset kepegawaian dan umum; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di



bidang bina marga meliputi perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan kebijakan operasional di bidang bina marga meliputi perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina marga meliputi perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang bina marga meliputi perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- f. pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga meliputi perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang cipta karya.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang cipta karya;



- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang cipta karya;
 - c. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah;
 - d. penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah, termasuk pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
 - e. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah;
 - f. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah;
 - g. pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah;
 - h. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah;
 - i. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang cipta karya;
 - k. pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang cipta karya; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Sumber Daya Air
- Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air.
- Dalam melaksanakan tugas Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang sumber daya air;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan



kebijakan di bidang sumber daya air;

- c. penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- d. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- e. penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- f. pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- g. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sumber daya air;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang sumber daya air;
- i. pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang yang meliputi pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang tata ruang;



- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan tata ruang;
- d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang;
- e. perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- f. perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
- g. penyiapan dan fasilitasi kerja sama penataan ruang;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang tata ruang;
- i. pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Bina Konstruksi

Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Bidang Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang bina konstruksi;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina konstruksi;
- c. pelaksanaan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- d. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah;
- e. pelaksanaan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan



- pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
- f. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
 - g. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
 - h. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang bina konstruksi;
 - j. pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina konstruksi; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara Lengkap Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi dapat dilihat pada gambar 2.1.1 sebagai berikut :



Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi



2.3. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten

Sumber daya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merujuk pada seluruh potensi yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Sumber daya ini mencakup:

1. Sumber Daya Manusia

Meliputi seluruh pegawai dan tenaga pendukung lainnya yang memiliki kompetensi, keahlian, dan kapasitas dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pengendalian program dan kegiatan infrastruktur dan tata ruang.

Gambaran tentang pegawai dan tenaga pendukung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berjumlah dapat dilihat pada tabel-tabel berikut dibawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan ASN dan Non ASN
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten sigi
Tahun 2025

NO	Status Kepegawaian	Laki-Laki (orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	39	15	54
2	Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)	6	1	7
3	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	1	1	2
4	Tenaga Kontrak	115	13	128
	TOTAL	161	30	191

Sumber data : DPUTR Kab. Sigi Tahun 2025 Bagian Kepegawaian dan Umum, data diolah



Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi Tahun 2025 sebanyak 191 orang, yang terdiri dari 161 orang laki-laki (84,3%) dan 30 orang perempuan (15,7%).

Jika dilihat dari status kepegawaian, terdapat 54 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri atas 39 laki-laki dan 15 perempuan, serta 7 orang Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang terdiri atas 6 laki-laki dan 1 perempuan. Sementara itu, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 2 orang, terdiri atas 1 laki-laki dan 1 perempuan. Selain itu, jumlah terbanyak berasal dari Tenaga Kontrak, yaitu 128 orang, yang terdiri dari 115 laki-laki dan 13 perempuan.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi masih ditopang oleh tenaga kontrak, sementara jumlah ASN dan PPPK relatif lebih sedikit. Kondisi ini menggambarkan ketergantungan yang cukup besar terhadap tenaga non-ASN dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten sigi
Tahun 2025

No	Golongan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah
1	2	3	4	5
	PNS			
1	Golongan I			
2	Golongan II	10	1	11
3	Golongan III	27	13	40
4	Golongan IV	2	1	3
	PPPK			
1	Golongan IX	1	1	2
	TOTAL	40	16	56

Sumber data : DPUTR Kab. Sigi Tahun 2025 Bagian Kepegawaian dan Umum, data diolah



Berdasarkan Tabel 2.2 jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi Tahun 2025 sebanyak 56 orang yang terdiri dari 40 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. Komposisi pegawai didominasi oleh Golongan III sebanyak 40 orang (71,4%), disusul Golongan II sebanyak 11 orang (19,6%), Golongan IV sebanyak 3 orang (5,4%), dan PPPK Golongan IX sebanyak 2 orang (3,6%), sementara pada Golongan I tidak terdapat pegawai. Dari jenis kelamin, pegawai laki-laki lebih mendominasi dibandingkan perempuan, yang sejalan dengan karakteristik pekerjaan teknis di bidang pekerjaan umum dan tata ruang. Struktur kepegawaian tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pegawai berada pada jenjang karier menengah, sedangkan jumlah pegawai pada golongan tinggi maupun tenaga perempuan masih relatif terbatas.

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi juga didukung dengan sarana dan prasarana yang merupakan barang milik daerah yang dikuasakan untuk digunakan bagi kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Selain gedung kantor serta sarana dan prasarana lainnya termasuk peralatan uji mutu bahan jalan dan air, alat-alat besar darat sangatlah menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi khususnya dalam hal penyelenggaraan jalan. Alat-alat besar darat tersebut merupakan bagian dari unit pemeliharaan rutin jalan (UPR) yang juga sering kali berfungsi sebagai Disaster Relief Unit (DRU) pada saat penanggulangan bencana tanah longsor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini prasarana penunjang yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi :



Tabel 2.3
Jenis, Jumlah Alat Besar Yang Dimiliki
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi
Tahun 2025

No	Jenis Kendaraan	Jumlah (unit)	Kondisi
1	2	3	4
1	Buldozer	2	Baik
2	Dump Truck	3	Baik
3	Tronton	1	Baik
4	Wheel Loader	1	Baik
5	Excavator	2	Baik
6	Motor Grader	1	Baik
7	Triseda	1	Baik
8	Tandem Roller	2	Baik
9	Mobil Operasional Dinas	8	Baik
10	Motor Operasional Dinas	43	Baik

Sumber data : DPUTR Kab. Sigi Tahun 2025 Bagian Aset, data diolah

Berdasarkan data inventarisasi aset pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi Tahun 2025, diketahui bahwa instansi ini memiliki berbagai jenis alat besar yang digunakan untuk mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur, pemeliharaan jalan, serta pekerjaan teknis lainnya.

Secara keseluruhan terdapat 62 unit alat dan kendaraan operasional dengan kondisi yang sebagian besar masih dalam keadaan baik. Alat berat yang dimiliki antara lain 2 unit buldozer, 3 unit dump truck, 1 unit tronton, 1 unit wheel loader, 2 unit excavator, 1 unit motor grader, 1 unit triseda, serta 2 unit tandem roller. Selain itu, untuk mendukung kelancaran operasional, Dinas PUTR juga memiliki 8 unit mobil operasional dinas dan 43 unit motor operasional dinas.

Ketersediaan peralatan tersebut menjadi aset penting bagi Pemerintah Kabupaten Sigi dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, khususnya pada bidang pekerjaan umum dan tata



ruang. Meskipun secara umum kondisinya masih baik, ke depan diperlukan upaya pemeliharaan yang berkelanjutan serta penambahan peralatan sesuai kebutuhan agar pelayanan infrastruktur dapat semakin optimal.

2.4. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi

Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi periode 2022-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi
Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun Ke-				Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-				Persentase Capaian Pada Tahun Ke -			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Indikator Kerja Utama (IKU)														
1	Persentase terpenuhinya SPM Air Minum	%	27.92	30.09	32,26	34,43	27.92	28.72	30.19	31.80	100	95.45	93.58	92.36
2	Persentase terpenuhinya SPM Sanitasi	%	58.48	60	61.52	63.04	58.48	57.49	59.72	62.51	100	95.82	97.07	99.16
3	Persentase panjang jalan kondisi baik	%	74.00	78.00			69.75	58.25			94.26	74.68		
4	Persentase panjang jalan kabupaten dan desa dalam kondisi baik	%			57.23	58.81			62.36	26.41			108.96	44.91
5	Persentase jembatan kondisi baik	%	75	80			81.58	44.40			108.77	55.50		
6	Persentase peningkatan layanan areal persawahan	%	49.63	54.63			49.58	50.19			99.90	91.87		
7	Persentase area sawah yang terlayani irigasi	%			73.44	74.44			62.22	62.67			84.72	84.19
8	Persentase penataan ruang sesuai RTRW Kabupaten	%	20	22.24	52.99	92.79	20	20.00	25	60	100	89.93	47.18	64.66
Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Permen PUPR Nomor 23 Tahun 2023														
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	%	-	100	100	100	-	100	69.53	100	-	100	69.53	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	%	-	100	100	100	-	100	62.08	100	-	100	62.08	100



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun Ke-				Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-				Persentase Capaian Pada Tahun Ke -			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IKK berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017														
1	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	0.70	0.58	0.62	0.26	-	-	-	-
2	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	-	-	-	-	69.06	72.69	76.55	82.06	-	-	-	-
3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	47.77	63.34	68.76	69.27	-	-	-	-
4	Persentase penduduk berakses air minum	%	-	-	-	-	69.06	72.69	76.55	74.82	-	-	-	-
5	Ketaatan terhadap RTRW	%	-	-	-	-	-	0.05	0.09	0.08	-	-	-	-

Sumber data : Laporan LAKIP DPUTR Kab. Sigi Tahun 2024, data diolah



Tabel 2.4 menggambarkan perkembangan capaian kinerja DPUTR Kabupaten Sigi dalam kurun waktu 2021–2024 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Permen PUPR Nomor 23 Tahun 2023.

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Persentase terpenuhinya SPM Air Minum.
 - Target ditetapkan dari 27,92% sampai 34,43% di tahun 2024.
 - Realisasi yang dicapai dari 27,92% sampai 31,80% di tahun 2024
 - Persentase capaian yang tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 100 %. Di tahun 2022 – 2024 persentase capaian menurun berkisar 90 % di tiap tahunnya walupun menurun tetap menunjukkan pencapaian yang positif. Konsistensi perlu dijaga agar pada tahun-tahun mendatang target dapat terpenuhi secara penuh.
 - Analisis Kinerja indikator ini sangat baik dan menunjukkan pemenuhan target yang hampir sempurna secara bertahap.
2. Persentase terpenuhinya SPM Sanitasi
 - Target ditetapkan dari 58,48% sampai 63,04% di tahun 2024
 - Realisasi yang dicapai dari 58,48% sampai 62,51% di tahun 2024. mencapai 99,16% di tahun 2024.
 - Persentase capaian yang tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 100 %. Di tahun 2022 – 2024 persentase capaian menurun berkisar 90 % di tiap tahunnya walupun menurun tetap menunjukkan pencapaian yang positif. Konsistensi perlu dijaga agar pada tahun-tahun mendatang target dapat terpenuhi secara penuh.
 - Analisis Kinerja indikator ini sangat baik dan menunjukkan pemenuhan target yang hampir sempurna secara bertahap.
3. Persentase panjang jalan kondisi baik
 - Target ditetapkan dari 74% sampai 78 % di tahun 2022. Di tahun 2023 sampai 2024 indikator tersebut tidak digunakan lagi dikarenakan adanya perubahan indikator.



- Realisasi menunjukkan adanya penurunan dari 69,75% di tahun 2021 menjadi 58,25% di tahun 2022.
 - Persentase capaian menunjukkan adanya penurunan dari 94,26% menjadi 74,68 % pada tahun 2022.
 - Analisis kinerja adanya penurunan pencapaian kinerja dikarenakan adanya perubahan penilaian terhadap kondisi jalan yang semula jalan dalam kondisi baik terdiri dari tiga kategori yaitu kategori baik, rusak sedang dan rusak ringan. Di tahun 2022 kategori penilaian terhadap kondisi jalan hanya terdiri dari dua kategori yaitu kondisi baik dan kondisi sedang. Meski belum sepenuhnya mencapai target akhir, pencapaian relatif tinggi dan menunjukkan peningkatan kualitas jalan secara berkelanjutan.
4. Persentase panjang jalan kabupaten dan desa dalam kondisi baik.
- Indikator ini digunakan pada tahun 2023 sampai 2024 dengan target yang ditetapkan sebesar 57,23% dan 58,81%.
 - Realisasi menunjukkan adanya penurunan drastis dari 62,36% di tahun 2022 turun ke 26,41% di tahun 2024.
 - Persentase capaian menunjukkan adanya penurunan yang drastis dimana tahun 2023 persentase capaian sebesar 108,96% di tahun 2024 turun menjadi 44,91%.
 - Analisis kinerja terhadap turunnya persentase capaian kinerja dikarenakan di tahun 2024 adanya perubahan SK Gubernur tentang ruas jalan kewenangan kabupaten, dimana panjang jalan kewenangan Kabupaten Sigi yang semula 1.153,15 Km menjadi 1.168,22 Km serta kondisi ruas yang bertambah masuk dalam kondisi rusak berat dan ringan sehingga mempengaruhi perhitungan tingkat kemantapan jalan.



5. Persentase jembatan kondisi baik.
 - Indikator ini digunakan pada tahun 2021 dan 2022 dengan target sebesar 75% di tahun 2021 dan 80% di tahun 2022.
 - Realisasi menunjukkan adanya penurunan dari 81.78% di tahun 2021 menjadi 44,40% di tahun 2022.
 - Persentase capaian menunjukkan adanya penurunan yang drastis dimana tahun 2021 sebesar 108.77% turun menjadi 55.50% di tahun 2022.
 - Penurunan ini terjadi dikarenakan jumlah jembatan yang ditargetkan berubah dari 152 unit pada tahun 2021 menjadi 259 Unit pada tahun 2022 sehingga nilai pembagi pada tahun 2022 menjadi lebih besar dibandingkan pada tahun 2021. Selain itu terdapat juga penurunan kondisi jembatan dari sedang menjadi rusak berat diakibatkan terjangkit banjir diakibatkan kondisi cuaca ekstrim pada tahun 2022.
6. Persentase peningkatan layanan areal persawahan
 - Target yang ditetapkan di tahun 2021 yaitu 49,63% dan 54,63% di tahun 2022.
 - Terdapat peningkatan dari realisasi yang dicapai yaitu di tahun 2021 realisasi sebesar 49,58% dan di tahun 2022 sebesar 50,19% walaupun tidak mencapai target yang diperjanjikan.
 - Persentase capaian menunjukkan adanya penurunan dari 99,90% di tahun 2021 menjadi 91,87% di tahun 2022. Walaupun terjadi penurunan namun persentase capaian tergolong baik.
 - Analisa terhadap capaian kinerja yang tidak memenuhi target dikarenakan pendanaan yang ada hanya di khususkan untuk mempertahankan kondisi Layanan Areal Persawahan bukan untuk meningkatkan kondisi Layanan Areal Persawahan. Sehingga hanya fokus pada operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
7. Persentase area sawah yang terlayani irigasi
 - Target yang ditetapkan di tahun 2023 yaitu 73,44% dan 74,44% di tahun 2024.



- Realisasi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 62,22% di tahun 2023 dan 62,67% di tahun 2024.
 - Persentase capaian relatif tetap berada di 84,72% di tahun 2023 dan 84,19 di tahun 2024.
 - Analisis pencapaian Kinerja masih di bawah target, namun relatif stabil. Perlu peningkatan jaringan irigasi secara berkelanjutan.
8. Persentase penerima manfaat rumah layak huni.
- Target yang ditetapkan yaitu 85% di tahun 2021 dan 88% di tahun 2022.
 - Realisasi yang dicapai yaitu sebesar 84,32% di tahun 2021 dan 81,53% di tahun 2022
 - Persentase capaian termasuk tinggi mencapai 99.20 di tahun 2021 dan 92,65% di tahun 2022.
 - Pencapaian yang didapat menunjukkan keberhasilan program rumah tidak layak huni di tahun 2021 yang hampir menyentuh target maksimal.
 - Walaupun persentase pencapaian target mencapai 90% tetapi belum memenuhi sesuai target yang ditentukan. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran daerah dimana DAK perumahan di fokuskan untuk pembangunan rumah untuk korban bencana.
9. Persentase penataan ruang sesuai RTRW Kabupaten.
- Target yang ditetapkan hingga tahun 2024 yaitu 92,79%
 - Realisasi yang dicapai tiap tahunnya cenderung meningkat dengan capaian tertinggi sebesar 60%.
 - Persentase pencapaian yang memenuhi target di tahun 2021 sebesar 100%.
 - Analisa Meskipun realisasi tahun 2024 meningkat secara nominal, capaian terhadap target menurun, sehingga perlu sinkronisasi perencanaan dan implementasi RTRW.



2. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari (%)
 - Target yang akan dicapai setiap tahunnya yaitu 100%.
 - Realisasi untuk tahun 2022 dan 2024 yaitu 100%. Untuk tahun 2023 yaitu sebesar 69,53%
 - Ditahun 2023 persentase capaian sebesar 69,23% dikarenakan adanya kekeliruan dalam perhitungan baik target maupun capaian akibat perbedaan tinjauan dalam perhitungan dalam penentuan target.
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik (%)
 - Target yang akan dicapai setiap tahunnya yaitu 100%.
 - Realisasi untuk tahun 2022 dan 2024 yaitu 100%. Untuk tahun 2023 yaitu sebesar 62.08%
 - Ditahun 2023 persentase capaian sebesar 62.08% dikarenakan adanya kekeliruan dalam perhitungan baik target maupun capaian akibat perbedaan tinjauan dalam penentuan target.

3. IKK berdasarkan Permendagri nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja periode 2021–2024, capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi menunjukkan variasi perkembangan antar indikator, dengan beberapa capaian cukup baik namun juga terdapat indikator yang masih menghadapi tantangan serius.

1. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik mengalami fluktuasi dengan tren menurun. Pada tahun 2021 capaian sebesar 0,70, menurun menjadi 0,58 di tahun 2022, naik sedikit ke 0,62 pada 2023, dan menurun tajam menjadi 0,26 pada 2024. Rendahnya capaian ini pada tahun 2024 disebabkan oleh adanya perubahan SK Gubernur tentang ruas jalan kewenangan kabupaten, dimana panjang jalan kewenangan Kabupaten Sigi yang semula 1.153,15 Km menjadi 1.168,22 Km serta kondisi ruas yang bertambah masuk dalam kondisi rusak berat dan ringan sehingga



mempengaruhi perhitungan tingkat kemantapan jalan. Faktor lainnya yaitu keterbatasan alokasi anggaran untuk pemeliharaan rutin dan berkala, serta tingginya tingkat kerusakan jalan akibat bencana alam berupa banjir dan longsor mengingat wilayah Kabupaten Sigi merupakan wilayah yang rawan akan bencana alam.

2. Persentase rumah tinggal bersanitasi menunjukkan capaian yang meningkat dari 69,00 persen di tahun 2021 menjadi 82,06 persen di tahun 2024. Keberhasilan ini didukung oleh adanya program nasional dan daerah terkait sanitasi, sinergi lintas sektor, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan.
3. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik meningkat cukup signifikan, dari 47,77 persen pada 2021 menjadi 69,27 persen pada 2024. Capaian ini dipengaruhi oleh pelaksanaan program rehabilitasi jaringan irigasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi melalui dukungan dana APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan pemeliharaan pasca rehabilitasi dan peningkatan kerusakan jaringan akibat bencana alam berupa banjir.
4. Persentase penduduk yang berakses air minum layak relatif konsisten di atas 70 persen, dengan capaian tertinggi 76,55 persen pada tahun 2023. Keberhasilan ini didukung oleh program SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum). Namun penurunan pada 2024 menjadi 74,82 persen dikarenakan anggaran yang tersedia hanya untuk pemeliharaan sarana dan prasarana air minum serta tidak adanya lokus untuk DAK di tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya tantangan pada aspek keberlanjutan layanan, keterbatasan kapasitas operasional, serta kerusakan infrastruktur akibat bencana.
5. Ketaatan terhadap RTRW masih sangat rendah, berkisar antara 0,05–0,09 sepanjang periode evaluasi. Rendahnya capaian ini disebabkan oleh lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang, keterbatasan aparat pengawas tata ruang, rendahnya kesadaran masyarakat maupun pelaku usaha, serta belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah dalam penegakan aturan pemanfaatan ruang.



Secara umum, capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi periode 2021–2024 memperlihatkan hasil yang cukup baik di bidang sanitasi, irigasi, dan akses air minum. Namun demikian, masih terdapat tantangan besar pada sektor jalan kabupaten dan kepatuhan terhadap RTRW. Faktor-faktor penyebab utama yang memengaruhi capaian antara lain:

- Keterbatasan anggaran terutama pada kegiatan pemeliharaan jalan dan pengawasan tata ruang.
- Kondisi geografis dan bencana alam seperti curah hujan tinggi, banjir, dan tanah labil yang mempercepat kerusakan infrastruktur.
- Keterbatasan kelembagaan dan SDM, khususnya dalam pengawasan tata ruang serta operasional dan pemeliharaan sarana prasarana.
- Masih terbatasnya penerapan teknologi dan inovasi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
- Kesadaran masyarakat yang bervariasi, terutama dalam aspek pemanfaatan ruang dan keberlanjutan layanan infrastruktur dasar.

Ringkasan anggaran dan realisasi belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan dan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi
Tahun 2021-2024

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.)				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.)				Persentase Realisasi Anggaran (%)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12,923,180,330	14,676,767,587	10,596,067,169	5,974,137,903	12,655,504,009	13,550,875,082	9,914,915,949	5,474,046,300	97.93	92.33	93.57	91.63
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	9,630,473,772	3,596,530,000	18,501,529,757	16.869.835.188	9,077,255,150	3,594,750,804	18,257,037,392	16.204.228.782	94.26	99.95	98.68	96.05
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	25,566,968,310	13,348,207,354	10,336,142,980	8,673,741,174	24,924,100,220	131,207,504,318	9,004,677,639	8,633,518,663	95.20	982.96	87.12	99.54
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7,045,095,731	5,969,110,000	807,499,800	1,200,000,000	6,903,686,566	5,961,048,594	705,667,700	1,197,182,262	97.99	99.86	87.39	99.77
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Drainase	100,000,000	-	540,000,000	-	99,796,061	-	537,500,000	-	99.80	-	99.54	-
6	Program Bangunan Gedung	-	1,158,900,000	520,550,386	10,307,776,826		1,140,799,778	509,681,300	10,083,700,885	-	98.44	97.91	97.83
7	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1,640,320,875	17,809,385,884	23,090,540,720	33,500,000,000	1,486,508,275	17,764,453,340	21,708,330,008	33,380,949,927	90.62	99.75	94.01	99.64
8	Program Penyelenggaraan Jalan	62,171,870,440	60,226,348,358	116,683,755,952	95,666,818,879	61,322,799,078	60,038,636,186	114,769,766,921	95,053,328,566	98.63	99.69	98.36	99.36
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	20,000,000	161,700,000	100,050,000	-	19,970,000	161,613,700	93,231,840	-	99.85	99.95	93.19	-
10	Program Penyelenggaraan Penata Ruang	881,251,875	549,999,900	1,231,808,360	-	859,195,234	548,217,292	1,092,992,520	-	97.50	99.68	88.73	-

Sumber data : SILAPRA DPUTR Kab. Sigi Tahun 2021 - 2024, data diolah



Berdasarkan Tabel 2.5, alokasi anggaran dan realisasi pendanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi dalam kurun waktu 2021–2024 menunjukkan dinamika yang cukup beragam pada masing-masing program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memperoleh alokasi anggaran yang relatif fluktuatif, dari Rp 12,923,180,330 pada tahun 2021 menjadi Rp. 5.974.137.903 di tahun 2024. Realisasi anggaran setiap tahun cukup baik, dengan persentase realisasi di atas 90%, yaitu antara 91,83% hingga 95,93%.
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) menunjukkan peningkatan alokasi dari Rp. 9.630.473.772 pada tahun 2021 dan alokasi anggaran tertinggi di tahun 2023 sebesar Rp. 18.501.529.757. Alokasi anggaran di tahun 2024 ini bersumber dari DAU PU dan DAK yang fokus pada rehabilitasi jaringan irigasi serta penyusunan dokumen perencanaan untuk beberapa daerah irigasi . Realisasi program ini sangat konsisten, dengan capaian rata-rata di atas 95% bahkan mencapai 98,65% pada tahun 2023.
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) memiliki anggaran cukup besar, mencapai Rp. 25,566,968,310 pada tahun 2021, namun menurun menjadi Rp. 8.673.741.174 pada tahun 2024. Penurunan nilai alokasi anggaran disebabkan tidak adanya dukungan anggaran yang bersumber dari DAK. Tingkat realisasi berkisar antara 81,72% hingga 95,54%.
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah menunjukkan penurunan anggaran signifikan dari Rp. 7.045.095.731 tahun 2021 menjadi Rp. 1.200.000.000 pada tahun 2024. Penurunan alokasi anggaran ini disebabkan oleh tidaknya dukungan anggran yang bersumber dari DAK. Persentase realisasi cukup tinggi, rata-rata di atas 90%, meskipun pada tahun 2023 turun menjadi 89,77%.



5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase menunjukkan pengalokasian anggaran hanya ada di tahun 2023 sebesar Rp. 100.000.000 walaupun di tahun 2024 naik menjadi Rp. 540.000.000. Dengan capaian realisasi tinggi mencapai 99%.
6. Program Bangunan Gedung memiliki alokasi kecil dan fluktuatif, di tahun 2022 alokasi anggaran sebesar Rp. 1.158.900.000 dan meningkat tajam di tahun 2024 sebesar Rp. 10.307.776.826 dengan capaian realisasi tinggi, mencapai 99,84% di tahun 2021.
7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan menunjukkan peningkatan signifikan dari Rp. 1.640.320.875 pada tahun 2021 menjadi Rp. 33.500.000.000 di tahun 2024. Realisasi program ini terbilang sangat baik konsisten di atas 90%.
8. Program Penyelenggaraan Jalan merupakan salah satu program terbesar dengan alokasi mencapai Rp. 62.171.870.440 pada 2021 dan meningkat hingga Rp. 95.666.818.879. pada 2024. Meskipun realisasi tinggi, persentase capaian cenderung fluktuatif, dari 95,49% pada 2021 hingga 96,36% pada 2024.
9. Program Penyelenggaraan Jasa Konstruksi memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000 pada 2021 kemudian meningkat hingga Rp. 100.000.000 pada 2024, dengan tingkat realisasi setiap tahunnya mencapai 90%.
10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang menunjukkan kenaikan signifikan dari Rp. 881.251.875. pada tahun 2021 menjadi Rp. 1.231.808.360 pada tahun 2023. Realisasi cukup baik meskipun cenderung menurun pada 2023 sebesar 88,73%.

2.5. Kelompok Sasaran Layanan

Adapun kelompok sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi sebagai berikut :

- a. Kelompok masyarakat khusus yaitu : petani pengguna jaringan irigasi, masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan akses ayak terhadap air minum dan sanitasi.



- b. Masyarakat umum sebagai pengguna sarana dan prasarana infrastruktur jalan, irigasi, air minum dan sanitasi.
- c. Masyarakat pelaku jasa konstruksi
- d. Forum Penataan Ruang sebagai mitra teknis dalam perencanaan tata ruang.
- e. Masyarakat yang mengajukan perizinan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
- f. Lembaga dan instansi pemerintah yaitu pemerintah pusat dan propinsi terkait sinkronisasi program serta pemerintah desa dan kecamatan terkait pemanfaatan infrastruktur.

2.6. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

2.6.1. Permasalahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sigi Nomor 24 Tahun 2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kelola Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi di tugaskan untuk membantu Bupati melaksanakan urusan pekerjaan umum dan tata ruang serta tugas perbantuan yang diberikan oleh kepala daerah.

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan tata ruang di Kabupaten Sigi menghadapi berbagai permasalahan yang berimplikasi langsung terhadap kualitas pelayanan publik, konektivitas wilayah, serta dukungan terhadap pembangunan sosial ekonomi. Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi antara lain:

1. Kondisi Infrastruktur Jalan dan Jembatan
 - Masih terdapat jaringan jalan kabupaten dalam kondisi rusak sedang hingga berat yang menghambat mobilitas orang, barang, dan jasa.
 - Keterbatasan kapasitas jembatan di beberapa titik strategis serta minimnya pemeliharaan rutin dan berkala.



- Aksesibilitas antar-kecamatan dan desa khususnya di wilayah pegunungan belum optimal.
- 2. Pengelolaan Sumber Daya Air
 - Jaringan irigasi belum menjangkau seluruh areal pertanian potensial.
 - Masih terdapat saluran irigasi yang rusak atau tidak berfungsi optimal akibat bencana banjir dan longsor mengingat Kabupaten Sigi merupakan wilayah yang rawan akan bencana alam.
 - Belum optimalnya operasi dan pemeliharaan irigasi oleh kelompok masyarakat maupun pemerintah daerah.
- 3. Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
 - Akses air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat masih terbatas terutama di wilayah pedesaan.
- 4. Penataan Ruang dan Kawasan
 - Pemanfaatan ruang belum sepenuhnya sesuai dengan rencana tata ruang.
 - Keterbatasan ketersediaan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) sebagai pedoman perizinan.
 - Lemahnya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang, serta tumpang tindih kewenangan antar-sektor.

2.6.2. Isu-Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi

Penetapan isu strategis ini dilakukan dengan mempertimbangkan potensi daerah yang menjadi kewenangan dinas, permasalahan yang ada di lapangan, serta hasil identifikasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang relevan. Selain itu, dinamika isu lingkungan pada skala global, nasional, dan regional juga menjadi bahan pertimbangan penting untuk memastikan bahwa arah kebijakan dan program yang dirumuskan adaptif terhadap tantangan masa kini dan masa depan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, analisis kondisi internal dan eksternal, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional maupun daerah, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan



umum dan tata ruang di Kabupaten Sigi pada periode 2025–2029 seperti dibawah ini :

1. Peningkatan kualitas dan konektivitas infrastruktur jalan dan jembatan guna mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah.
2. Optimalisasi pengelolaan sumber daya air dan irigasi dalam rangka mendukung ketahanan pangan daerah.
3. Perluasan cakupan layanan air bersih dan sanitasi layak untuk mendukung pencapaian target SDGs serta kualitas hidup masyarakat.
4. Peningkatan kualitas penataan ruang melalui percepatan penyusunan RDTR, pengendalian pemanfaatan ruang, serta penguatan koordinasi antar-sektor.

Tabel berikut menyajikan rangkuman isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi berdasarkan RPJMD Kabupaten Sigi tahun 2025-2029



Tabel 2.6
Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Sigi

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	5	6	7	8
Infrastruktur pertanian dan jalan tidak terintegrasi, Konektivitas dan logistik belum optimal	Masih terdapat jaringan jalan kabupaten dalam kondisi rusak sedang hingga berat yang menghambat mobilitas orang, barang dan jasa, Keterbatasan kapasitas jembatan di beberapa titik strategis serta minimnya pemeliharaan rutin dan berkala, Aksesibilitas antar-kecamatan dan desa khususnya di wilayah pegunungan belum optimal.	Aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Ketimpangan wilayah	Kesenjangan kualitas infrastruktur jalan daerah, lemahnya konektivitas infrastruktur, tingkat kemantapan jalan daerah masih jauh berada dibawah jalan nasional	Jalur konektivitas belum optimal	Peningkatan kualitas dan konektivitas infrastruktur jalan dan jembatan guna mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah.
Ketimpangan antar wilayah	Jaringan irigasi belum menjangkau seluruh areal pertanian potensial, masih terdapat saluran irigasi yang rusak atau tidak berfungsi optimal akibat bencana banjir dan longsor mengingat Kabupaten Sigi merupakan wilayah yang rawan akan bencana alam, Belum optimalnya operasi dan pemeliharaan irigasi oleh kelompok masyarakat maupun pemerintah daerah	Daya dukung dan daya tampung lingkungan; mitigasi bencana iklim	Perubahan iklim dan pemanasan global	Program ketahanan pangan, pengendalian banjir, penyediaan air baku	DAS Lariang dan Palu terancam erosi	Optimalisasi pengelolaan sumber daya air dan irigasi dalam rangka mendukung ketahanan pangan daerah serta pengendalian banjir



Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	5	6	7	8
Akses air minum dan sanitasi	Akses air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat masih terbatas terutama di wilayah pedesaan.	Penyediaan Aksesibilitas Dasar terhadap akses air minum aman dan sanitasi layak	Tuntutan pembangunan berkelanjutan (SDGs 6)	Penurunan kemiskinan dengan memperkuat layanan infrastruktur dasar berupa penyediaan akses air minum aman dan akses sanitasi layak	Masih terbatasnya akses air minum aman dan sanitasi layak di beberapa kecamatan terutama di daerah terpencil	Perluasan cakupan layanan air aman dan sanitasi layak untuk mendukung pencapaian target SDGs serta kualitas hidup masyarakat.
Wilayah rawan bencana	Pemanfaatan ruang belum sepenuhnya sesuai dengan rencana tata ruang. Keterbatasan ketersediaan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) sebagai pedoman perizinan. Lemahnya pengendalian dan pengawasan	Pengendalian pemanfaatan ruang; perlindungan kawasan lindung	Agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs 11)	Penuntasan Rencana tata ruang wilayah (nasional, kawasan strategis nasional, provinsi dan kabupaten/kota) dan integrasi RDTR dengan sistem OSS serta pengendalian pemanfaatan ruang.	Penguatan sistem mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta tata ruang responsif	Peningkatan kualitas penataan ruang melalui percepatan penyusunan RDTR, pengendalian pemanfaatan ruang, serta penguatan koordinasi antar-sektor

Sumber data : DPUTR Kab. Sigi, diolah



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung capaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya maka visi dan misi tersebut harus dijabarkan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa penetapan tujuan dan sasaran dalam suatu organisasi. Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu hingga 5 (lima) tahun. Dengan menetapkan tujuan ini maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi telah mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu hingga tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Rumusan tujuan dan sasaran yang mendukung Misi I : **Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Infrastruktur Secara Merata dan Berkeadilan** dan Misi IV : **Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Harmoni Sosial** yang akan dicapai dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini :



TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN SIGI
TAHUN 2025-2029

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUNAN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Meningkatnya kemudahan Konektivitas antar wilayah dalam Kabupaten.	Meningkatnya kemudahan Konektivitas antar wilayah Kabupaten.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	26,41	26.67	26.94	27.21	27.48	27.76	28.03	
			Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	69,27	69.96	70.66	71.37	72.08	72.80	73.53	
			Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	74,82	75.57	76.32	77.09	77.86	78.64	79.42	
			Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	82,01	82.83	83.66	84.49	85.34	86.19	87.06	
			Rasio ketaatan terhadap RTRW	0,08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
		Meningkatnya kemudahan Konektivitas antar wilayah dalam Kabupaten.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	23,02	23.25	23.48	23.71	23.95	24.19	24.43	



NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUNAN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Meningkatnya ketersediaan air yang berkelanjutan	Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	151	152.51	154.04	155.58	157.13	158.70	160.29	
		Meningkatnya Infrastruktur Keciaptakaryaan	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	69,66	70.36	71.06	71.77	72.49	73.22	73.95	
			Persentase peningkatan Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)	6,75	6.89	6.96	7.03	7,10	7.17	7,25	
			Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase penataan bangunan bangunan dan lingkungan	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya pengembangan jasa konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase perizinan kegiatan pemanfaatan ruang	0,09	0,09	0,12	0,16	0,20	0,24	0,28	
		meningkatkan efektifitas administrasi kesekretariatan	Nilai AKIP PD		71,20	71,20	71,20	71,20	71,20	71,20	



3.2. Penahapan Pembangunan

Penahapan pembangunan adalah proses pengaturan prioritas kegiatan dan capaian strategis setiap tahun selama periode lima tahunan (2025-2029) untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran jangka menengah dapat dicapai secara bertahap. Pada penahapan pembangunan infrastruktur dasar mengacu pada prinsip : Perencanaan, Impelementasi bertahap, pemeliharaan dan Evaluasi. Untuk penataan ruang mengacu pada prinsip : Perencanaan, penataan, pengendalian dan evaluasi.

Adapun tujuan dari penahapan pembangunan ini adalah :

1. Mengelola keterbatasan sumber daya (anggaran, sumber daya manusia, waktu) dengan memilih prioritas kegiatan tiap tahun;
2. Menyusun alur yang logis dan berurutan dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan evaluasi;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah;
4. Sebagai dasar untuk menyusun rencana kerja tahunan dan RKPD.

Penahapan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini :

TABEL 3.2
PENAHAPAN RENSTRA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN SIGI
TAHUN 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Perencanaan Infrastruktur dasar meliputi : Perencanaan Teknis Jalan, Perencanaan Teknis Sanitasi dan Air Minum, dan Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi	Rehabilitasi Jalan dalam kondisi rusak sedang dan ringan, Penyediaan sarana dan prasarana air minum untuk desa prioritas, Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi untuk desa prioritas dan Rehabilitasi jaringan irigasi	Peningkatan kondisi jalan, Perluasan jaringan air minum, Peningkatan kapasitas jaringan air minum, Pembangunan sistem sanitasi dan Peningkatan Jaringan irigasi	Pemeliharaan rutin dan berkala jalan kewenangan kabupaten, monitoring jaringan air minum dan sanitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten	Evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembangunan infrastruktur dan optimalisasi sarana dan prasarana infrastruktur eksisting



TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Peninjauan kembali RTRW Kabupaten Sigi, Penyusunan dokumen KLHS RTRW dan identifikasi kawasan strategis dan rawan bencana	Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan penguatan basis data geospasial (GIS)	Penetapan RDTR menjadi peraturan kepala daerah, penyusunan rencana pemanfaatan ruang jangka pendek dan sosialisasi pemanfaatan ruang	Peningkatan pengawasan pelaksanaan tata ruang dan penanganan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai RTRW/RDTR	Evaluasi pelaksanaan RTRW dan RDTR

3.3. Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi

Strategi merupakan langkah-langkah umum dan terarah yang disusun untuk menjawab isu-isu strategis dan mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029. Strategi ini menjadi dasar dalam merancang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara bertahap dan terintegrasi selama lima tahun ke depan.

Strategi pembangunan sektor pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Sigi diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar yang merata, meningkatkan kualitas layanan publik, serta menciptakan keteraturan dan keberlanjutan dalam pemanfaatan ruang wilayah. Penyusunan strategi juga mempertimbangkan aspek pemerataan, keberlanjutan lingkungan, ketahanan terhadap bencana, serta efisiensi dalam tata kelola pembangunan infrastruktur.

Adapun strategi yang diambil oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi dalam periode perencanaan tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan konektivitas dan kemantapan jaringan infrastruktur jalan dan jembatan antar kawasan dalam rangka memperkuat pelayanan dan pengembangan wilayah.



2. Memperkuat penyediaan dan pengelolaan sarana-prasarana air minum, sanitasi, irigasi yang inklusif, adaptif terhadap perubahan iklim, serta berbasis kebutuhan masyarakat.
3. Mengembangkan tata ruang wilayah yang tertib, terarah, dan berkelanjutan melalui penataan regulasi dan pemutakhiran dokumen perencanaan tata ruang.
4. Meningkatkan kualitas pengawasan jasa konstruksi melalui penerapan teknologi informasi, sertifikasi tenaga kerja konstruksi, serta pemantauan mutu pekerjaan secara berkelanjutan.
5. Meningkatkan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang dan penegakan aturan penataan ruang secara konsisten dan terintegrasi.
6. Mendorong integrasi sistem informasi infrastruktur dan penataan ruang berbasis spasial guna mendukung perencanaan yang akurat dan pengambilan keputusan yang cepat.

3.4. Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi menyusun arah kebijakan pembangunan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang selama periode 2025–2029.

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta menjawab berbagai isu dan tantangan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang di Kabupaten Sigi, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merumuskan arah kebijakan sebagai pedoman operasional pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2025–2029.

Arah kebijakan ini disusun secara sistematis dan terintegrasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang andal, merata, serta mendukung keberlanjutan dan ketahanan wilayah terhadap perubahan iklim dan risiko



bencana. Penataan ruang diarahkan agar dapat mengendalikan pemanfaatan ruang secara efektif dan mendukung pengembangan kawasan prioritas.

Untuk mencapai Visi Bupati sigi maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi Menerapkan kebijakan dapat dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini :

TABEL 3.4
ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN SIGI
TAHUN 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
1		Meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan	Meningkatkan kualitas perencanaan teknis jalan dan jembatan yang berbasis data kondisi eksisting dan kebutuhan wilayah. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi jalan kabupaten dengan memperhatikan konektivitas wilayah dan keberlanjutan serta peningkatan jalan yang sekaligus berfungsi sebagai jalur evakuasi	
2		Mengoptimalkan pengelolaan air melalui pembangunan irigasi, normalisasi sungai dan pengendalian banjir.	Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan irigasi melalui pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi	
3		Memperluas akses layanan dasar melalui pengembangan air minum, sanitasi, dan ruang publik.	Mengembangkan sistem penyediaan air minum dan sanitasi yang layak dan berwawasan lingkungan.	
4		Penyusunan dan implementasi rencana tata ruang yang berkelanjutan, menyusun dan menerapkan rencana tata ruang yang fokus pada pemanfaatan ruang yang efisien dan ramah lingkungan dengan mengidentifikasi zona-zona yang harus dilindungi seperti kawasan hutan lindung, lahan pertanian dan sumber daya alam vital lainnya	1. Menyusun dan meninjau kembali dokumen RTRW dan RDTR untuk menjawab dinamika pembangunan dan kebutuhan ruang. 2. Penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan risiko bencana 3. Pemanfaatan dan pengendalian penggunaan lahan dan hutan di kawasan rawan bencana	



NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
5		Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran pemanfaatan ruang, termasuk pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang serta memberikan sanksi tegas kepada pihak yang melanggar aturan untuk memastikan kelestarian lingkungan terjaga	Meningkatkan kualitas penegakan aturan tata ruang serta pengawasan pemanfaatan ruang di lapangan.	



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Sigi serta tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi menetapkan berbagai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar, khususnya pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Penetapan ini disusun secara sistematis dengan pendekatan *cascading* antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta rencana program dan kegiatan yang sejalan dengan prioritas pembangunan daerah, RPD Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029, dan kebijakan nasional.

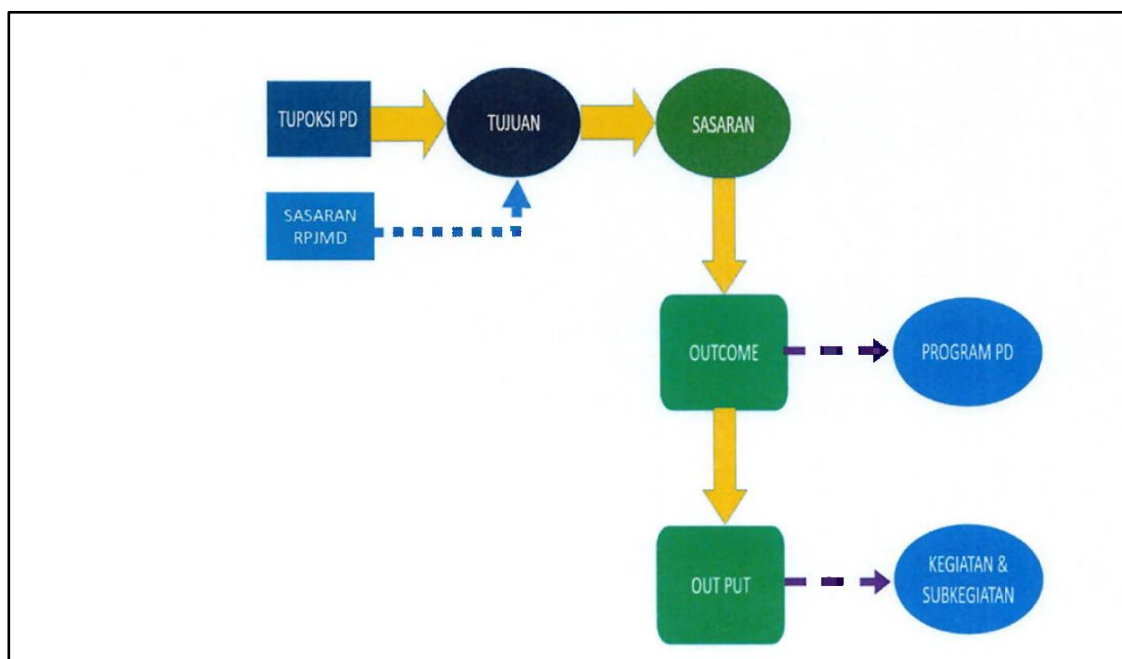
Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan untuk tahun 2025-2029 bidang urusan pekerjaan umum dan tata ruang Kabupaten Sigi diprioritaskan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi serta sesuai dengan Misi I : **“Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Infrastruktur Secara Merata dan Berkeadilan”** dan Misi IV : **“Mewujudkan Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Harmoni Sosial.**

Program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi sebagaimana tertuang dalam Bab III. Penyusunan program ini mengikuti pendekatan *cascading* dari level outcome hingga output, yang akan menjadi dasar perencanaan tahunan perangkat daerah. Seluruh program, Kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran



Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun kerangka perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

Adapun rumusan Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi 2025-2029 yaitu :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
5. Program Penataan Bangunan Gedung
6. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
7. Program Penyelenggaraan Jalan
8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
10. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



Untuk lebih jelasnya rumusan mengenai program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini :



TABEL 4.1
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN SIGI
TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.03.1.04.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang							
Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas dan Meningkatnya Penataan Ruang yang Berkelanjutan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar yang berkualitas serta penataan ruang yang berkualitas				Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten (%)		
					Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)		
					Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)		



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)		
					Rasio ketaatan terhadap RTRW (angka)		
		Meningkatnya Infrastruktur Keciptakarya	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum		Persentase masyarakat yang menerima akses terhadap layanan SPAM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
				Meningkatnya akses langsung masyarakat terhadap layanan air minum yang layak dan aman melalui sambungan rumah SPAM.	Jumlah sambungan rumah (SR) SPAM yang dibangun atau ditambah (SR)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (unit)	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	
					Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya (lembaga)	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
					Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Desa)	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (unit)	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (unit)	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
					Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
		Meningkatnya Infrastruktur Keciptakarya	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pengelolaan air limbah		Persentase masyarakat yang menerima akses pengolahan air limbah (%)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
				Meningkatnya akses rumah tangga terhadap layanan pengelolaan air	Jumlah rumah tangga penerima manfaat layanan pengelolaan air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				limbah domestik yang aman dan berkelanjutan		dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dibangun (MA3/Hari)	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	
					Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (unit)	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
					Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob yang dapat berupa tangki septik tank dengan pengolahan lanjutan sesuai SNI 2398 atau unit pengolahan setempat anaerob (rumah tangga)	Penyediaan unit pengolahan Setempat	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya Infrastruktur Keciaptakaryaan	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan		Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik (%)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
				Meningkatnya panjang saluran drainase yang memenuhi standar teknis	Panjang saluran drainase dalam kondisi baik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (m)	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	
					Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi (m)	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
		Meningkatnya Infrastruktur Keciaptakaryaan	Meningkatnya kualitas bangunan gedung		Persentase bangunan gedung yang memiliki dokumen teknis yang telah diverifikasi	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
				Meningkatnya jumlah pembangunan gedung yang sesuai dengan ketentuan tata ruang dan	Jumlah bangunan gedung yang diterbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				standar teknis melalui penerbitan PBG		Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
					Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif (Orang)	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Infrastruktur Keciaptakaryaan	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata		Jumlah kawasan yang ditata sesuai dengan standar teknis	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
				Terwujudnya rencana teknis bangunan dan lingkungan yang mendukung pembangunan kawasan yang terintegrasi dan berkelanjutan.	Jumlah dokumen perencanaan teknis penataan bangunan dan lingkungannya yang disusun (Dokumen)	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (orang)	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah kawasan di daerah Kabupaten/kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya kemudahan Konektivitas antar wilayah dalam Kabupaten.	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang aman dan nyaman		Tingkat kemantapan jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
				Terjaminnya keberfungsian jaringan jalan secara menyeluruh di wilayah kabupaten.	Jumlah ruas jalan yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi/dipelihara (Ruas)	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya (Km)	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	
					Jumlah Jembatan yang Diganti (Jembatan)	Penggantian Jembatan	
					Panjang Jalan yang Dibangun (Km)	Pembangunan Jalan	
					Panjang Jalan yang Direkonstruksi (Km)	Rekonstruksi Jalan	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)	Pemeliharaan Berkala Jalan	
					Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	Pemeliharaan Rutin Jembatan	
					Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi (Jembatan)	Rehabilitasi Jembatan	
					Jumlah Jembatan yang Dibangun (Jembatan)	Pembangunan Jembatan	
					Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (Km)	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
					Panjang Jalan yang Direhabilitasi (Km)	Rehabilitasi Jalan	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (Km)	Pemeliharaan Rutin Jalan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya ketersediaan air yang berkelanjutan	Meningkatnya Perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi		Persentase luas layanan irigasi Cakupan Penanganan sungai rawan banjir (Km)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Meningkatnya perencanaan dan pengelolaan sumber daya air yang terpadu, terukur, dan berkelanjutan di wilayah kabupaten	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sumber Daya Air (Dokumen)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (Km)	Normalisasi/Restorasi Sungai	
					Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	
					Jumlah Unit Air Baku yang Direhabilitasi (Km)	Rehabilitasi Unit Air Baku	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya panjang jaringan irigasi yang berada dalam kondisi baik	Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik (Meter)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (Km)	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (Km)	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (Km)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (Km)	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
		Meningkatnya pengembangan jasa konstruksi	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi		Jumlah tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi kompetensi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya kapasitas dan kompetensi tenaga kerja konstruksi terampil dalam mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan aman.	Jumlah pelatihan tenaga terampil konstruksi yang diselenggarakan (kegiatan)	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (orang)	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
				Meningkatnya kepatuhan dan profesionalisme pelaku jasa konstruksi dalam melaksanakan kegiatan konstruksi sesuai regulasi dan standar teknis yang berlaku.	Persentase pelaku jasa konstruksi yang diawasi (Badan Usaha)	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggara dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
					Jumlah paket pekerjaan jasa konstruksi kabupaten/kota yang diawasi dan dievaluasi tertib penyelenggaraan (paket pekerjaan)	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang		Persentase perizinan kegiatan pemanfaatan ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
				Meningkatnya legalitas dokumen tata ruang wilayah yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan	Jumlah dokumen RTRW/RDTR yang ditetapkan melalui Perkada (Dokumen)	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya kepatuhan dan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang yang berlaku	Persentase usulan kesesuaian ruang pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW/RDTR	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
		Meningkatnya efektifitas administrasi kesekretariatan	Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan		persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Barang Milik Daerah SKPD			
				Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersusunnya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya ¹	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	



4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Program prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi memuat indikasi program serta pagu indikatif program prioritas yang berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target Indikasi Program dan Pagu indikatif.

Indikasi program merupakan program-program dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun 2025-2030, sedangkan Pagu Indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program – program yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan program Perangkat Daerah, maka dialokasikan anggaran belanja langsung sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sigi 2025-2030 yang menjadi dasar dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini. Berikut rencana program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi beserta Kerangka Pendanaan diuraikan pada tabel 4.2 sebagai berikut:



TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN SIGI
TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				79.104.262.000		95.342.169.635		97.249.013.028		99.193.993.287		101.282.197.014	
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				9.174.338.270		9.357.825.03		9.544.981.536		9.735.881.167		9.930.598.790	
Meningkatnya Perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase luas layanan irigasi	69.27	69.42		69.56		69.71		69.85		70.00		
	Cakupan Penanganan sungai rawan banjir (Km)	12,951	15.00		18.00		21,6		26.00		31.00		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2,750,000,000		2.888.243.382		2.966.125.817		2,500,000,000		3.053.375.23	
Meningkatnya perencanaan dan pengelolaan sumber daya air yang terpadu, terukur, dan berkelanjutan di wilayah kabupaten	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sumber Daya Air (Dokumen)	7	8	2,750,000,000	8	2,888,243,382	8	2,966,125,817	8	2,500,000,000	8	3.053.375.23	
	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	12	12		10		10		10		10		
	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi (Lembaga)	0	1		1		1		1		1		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah Unit Air Baku yang Direhabilitasi (KM)	8	8		8		8		8		8		
	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	12,95	15		18		21,6		26		31		
	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	7	8		8		8		8		10		
1.03.02.2.01.0075 - Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota													
Kelembagaan Pengelolaan SDA Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)		12	200,000,000	12	252,000,000	10	254,520,000	10	200,000,000	10	300,520,000	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.02.2.01.0078 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota melalui Koordinasi dan Sinkronisasi		0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai				900.000.000		909.000.000		918.090.000		200.000.000		909.339.415	
Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstor asi (Km)	12,951	15	900.000.000	18	909.000.000	21.6	918.090.000	26.00	200.000.000	31.00	909.339.415	
1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya				1,250,000,000		1,262,500,000		1,275,125,000		1,700,000,000		1,425,125,000	
Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	7	8	1,250,000,000	8	1,262,500,000	8	1,275,125,000	8	1,700,000,000	10	1,425,125,000	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.02.2.01.0108 Rehabilitasi Unit Air Baku				300,000,000		364,743,382		418,390,817		300,000,000		318,390,815	
Terehabilitasinya Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Direhabilitasi (Km)		8	300,000,000	8	364,743,382	8	418,390,817	8	300,000,000	8	318,390,815	
1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				6,524,338,272		6.469.581.653		6.578.855.719		7.235.881.167		6.877.223.560	
Meningkatnya panjang jaringan irigasi yang berada dalam kondisi baik	Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik (Meter)	10,564	1,653	6,524,338,272	1,455	6.469.581.653	1,769	6.578.855.719	1,945	7.235.881.167	1,441	6.877.223.560	
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	0	8,92		6,54		8,14		9,19		11,80		
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	10	12,71		13,36		9,28		15,94		12,27		
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	0	11,92		10,25		16,94		11,32		13,14		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.02.2.02.0002 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan													
Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (Km)		5	1,200,000,000	5	1,212,000,000	5	1,224,120,000	5	1,050,000,000	5	1,524,120,000	
1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan													
Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (Km)		11,92	3.032.999.998	10,25	3.044.329.998	16,94	3.069.351.549	11,32	3.227.583.998	13,13	3.067.719.389	
1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan													
Terehabilitasinya Bendung Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (Km)		8,92	1,391,338,272	6,54	1,405,251,655	8,14	1,419,304,170	9,19	1,200,000.000	11,80	1,419,304,171	
1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan													
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (Km)	10	12,71	800,000,000	13,36	808,000,000	9,28	866,080,000	15,94	958,297,169	12,27	866,080,000	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.03-PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				9.878.841.350		10.076.418.177		10.277.946.541		10.483.505.471		10.693.175.581	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase masyarakat yang menerima akses terhadap layanan SPAM	74.82	75.26	9.878.841.350	75.69	10.076.418.177	76.13	10.277.946.541	76.56	10.483.505.471	77.00	10.693.175.581	
1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				9.878.841.350		10.076.418.177		10.277.946.541		10.483.505.471		10.693.175.581	
Meningkatnya akses langsung masyarakat terhadap layanan air minum yang layak dan aman melalui sambungan rumah SPAM.	Jumlah sambungan rumah (SR) SPAM yang dibangun atau ditambah (SR)	50	182		182		182		182		182		
	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Desa)	0	1		1		1		1		1		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	1	1		1		1		1		1		
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit)	0	1		1		1		1		1		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)	5	5		5		5		5		5		
	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	0	182		182		182		182		182		
	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Orang)	0	20		20		20		20		20		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	4	5		5		5		5		5		
1.03.03.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan				1.958.912.473		1.948.912.473		1.938.912.473		2.133.545.549		1.197.696.393	
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (unit)		5	1.958.912.473	5	1.948.912.473	5	1.938.912.473	5	2.133.545.549	5	1.197.696.393	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.03.2.01.0024 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Orang)	0	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	
1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00	
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	4	5	700.000.000	5	700.000.000	5	700.000.000	5	700.000.000	5	700.000.000	
1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				1.958.912.473		1.948.912.473		1.938.712.473		2.133.545.551		1.197.696.393	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	1	1	1.958.912.473		1.948.912.473		1.938.712.473		2.133.545.551		1.197.696.393	
1.03.03.2.01.0027 - Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terbinanya Desa dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Desa)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				1.958.912.473		1.948.912.473		.938.712.473		2.133.545.551		1.197.696.393	
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	1	1	1.958.912.473	1	1.948.912.473	1	1.938.712.473	1	2.133.545.551	1	1.197.696.393	
1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				400.000.000		500.000.000		500.000.000		449.323.269		1.952.390.009	
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang	0	1	400.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	449.323.269		1.952.390.009	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)												
1.03.03.2.01.0030 - Fasilitas Kerja Penyelenggaraan Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
1.03.03.2.01.0031 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				243.191.458		380.768.285		500.000.000		300.000.000		1.000.000.000	
Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	1	1	243.191.458	1	380.768.285	1	500.000.000	1	300.000.000	1	1.000.000.000	
1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				1.958.912.473		1.948.912.473		1.938.912.473		2.133.545.551		1.197.696.393	
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	0	182	1.958.912.473	182	1.948.912.473	182	1.938.912.473	182	2.133.545.551	182	1.197.696.393	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.03.2.01.0033 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan				300.000.000		300.000.000		299.600.000		100.000.000		1.500.000.000	
Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	0	1	300.000.000	1	300.000.000	1	299.600.000	1	299.600.000	5	1.500.000.000	
1.03.03.2.01.0034 -- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan pelaksana penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya (lembaga)		1	100,000,000	1	100,000,000	1	123,096,649	1	100,000,000	1	200,000,000	
1.03.05 -PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				1.000.000.000		1.020.000.000		1.040.400.000		1.061.208.000		1.082.432.160	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap pengelolaan air limbah	Persentase masyarakat yang menerima akses pengolahan air limbah (%)	82	82,61	1.000.000.000	83,21	1.020.000.000	83,80	1.040.400.000	84,40	1.061.208.000	85	1.082.432.160	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.05.2.01Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.000.000.000		1.020.000.000		1.040.400.000		1.061.208.000		1.082.432.160	
Meningkatnya akses rumah tangga terhadap layanan pengelolaan air limbah domestik yang aman dan berkelanjutan	Jumlah rumah tangga penerima manfaat layanan pengelolaan air limbah	50	50		50		50		50		50	1.082.432.160	
	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dibangun (MÂ³/Hari)	7600	7600		7600		7600		7600		7600		
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	0	2		2		2		2		2		
	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat	50	57		57		57		57		57		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)												
	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1	1		1		1		1		1		
1.03.05.2.01.0031 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu				300.000.000		306.000.000		312.120.000		318.362.400		324.709.648	
Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dibangun (MA3/Hari)		7600	300,000,000	7600	306.000.000	7600	312.120.000	7600	318.362.400	7600	324.709.648	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.05.2.01.0038 -Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				200.000.000		200.000.000		226.520.000		253.570.400		281.161.808	
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (unit)	1	1	200,000,000	1	200,000,000	1	226,520,000	1	253,570,400	1	281,161,808	
1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan unit pengolahan Setempat				200,000,000		200,000,000		200,000,000		199.999.800		200,000,000	
Tersedianya unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob yang dapat berupa tangki septik tank dengan pengolahan lanjutan	50	57	200,000,000	57	200,000,000	57	200,000,000	57	199.999.800	57	200,000,000	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	sesuai SNI 2398 atau unit pengolahan setempat anaerob (rumah tangga)												
1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				300.000.000		314.000.000		301.760.000		289.275.400		276.560.704	
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)		2	300.000.000	2	314.000.000	2	301.760.000	2	289.275.400	2	276.560.704	
1.03.06 -PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		-		900.000.000		918.000.000		936.360.000		955.087.200		974.188.944	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	100	100	900.000.000	100	918.000.000	100	936.360.000	100	955.087.200	100	974.188.944	
1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				900.000.000		918.000.000		936.360.000		955.087.200		974.188.944	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya panjang saluran drainase yang memenuhi standar teknis	Panjang saluran drainase dalam kondisi baik (m)	-	1000	900.000.000	1000	918.000.000	1000	936.360.000	1000	955.087.200	1000	974.188.944	
	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi (M)		1000		1000		1000		1000		1000		
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)		2		2		2		2		2		
	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)		1000		1000		1000		1000		1000		
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)		2		2		2		2		2		
1.03.06.2.01.0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (m)	0	1000	300.000.000	1.000	300.000.000	1.000	300.000.000	1.000	300.000.000	1.000	300.000.000	
1.03.06.2.01.0020 - Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Teroptimalisasinya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi (m)		1000	200.000.000,00	1000	200.000.000,00	1000	200.000.000,00	1000	200.000.000,00	1000	200.000.000,00	
1.03.06.2.01.0030 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan				200.000.000		218.000.000		236.360.000		255.087.200		274.188.944	
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	0	2	200.000.000	2	218.000.000	2	236.360.000	2	255.087.200	2	274.188.944	
1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	0	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	
1.03.08 -PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				300.000.000		306.000.000		312.120.000		318.362.400		324.729.648	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase bangunan gedung yang memiliki dokumen teknis yang telah diverifikasi	100	100	300.000.000	100	306.000.000	100	312.120.000	100	318.362.400	100	324.729.648	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				300.000.000		306.000.000		312.120.000		318.362.400		324.729.648	
Meningkatnya jumlah pembangunan gedung yang sesuai dengan ketentuan tata ruang dan standar teknis melalui penerbitan PBG	Jumlah bangunan gedung yang diterbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	99	100	300.000.000	100	306.000.000	100	312.120.000	100	318.362.400	100	324.729.648	
	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan (Bangunan Gedung Cagar Budaya)	0	2		2		2		2		2		
	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan		20		20		20		20		20		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kompensasi, Insentif dan Disinsentif (Orang)												
	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	196	200		200		200		200		200		
1.03.08.2.01.0015 - Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan (Bangunan Gedung Cagar Budaya)	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	
1.03.08.2.01.0016 - Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif (Orang)	20	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				100.000.000		106.000.000		112.120.000		118.362.400		124.729.648	
Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	196	200	100.000.000	200	106.000.000	200	112.120.000	200	118.362.400	200	124.729.648	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				1.687.300.000		11.721.046.000		11.955.466.920		12.194.576.258		12.438.467.784	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Jumlah kawasan yang ditata sesuai dengan standar teknis	9	9	1.687.300.000	9	11.721.046.000	9	11.955.466.920	9	12.194.576.258	9	12.438.467.784	
1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				1.687.300.000		11.721.046.000		11.955.466.920		12.194.576.258		12.438.467.784	
Terwujudnya rencana teknis bangunan dan lingkungan yang mendukung pembangunan kawasan yang terintegrasi dan berkelanjutan.	Jumlah dokumen perencanaan teknis penataan bangunan dan lingkungannya yang disusun (Dokumen)	10	3	1.687.300.000	9	11.721.046.000	9	11.955.466.920	9	12.194.576.258	9	12.438.467.784	
	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (orang)	0	5		5		5		5		5		
	Jumlah kawasan di daerah Kabupaten/kota yang dilaksanakan penataan bangunan	8	1		3		3		3		3		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	dan lingkungan (Kawasan)												
	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	10	3		9		9		9		9		
1.03.09.2.01.0012 - Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkunganungan				200.000.000		200.000.000		200.000.000,		200.000.000		200.000.000	
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penataan dan lingkungan	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (orang)	0	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	
1.03.09.2.01.0011-Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota				1.187.300.000		10.621.046.000		10.855.466.920		11.094.576.258		11.338.467.784	
Terlaksananya penataan bangunan dan lingkungan di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan di daerah Kabupaten/kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)		9	1.187.300.000	9	10.621.046.000	9	10.855.466.920	9	11.094.576.258	9	11.338.467.784	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.09.2.01.0010 - Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				300.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000	
Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	10	3	300.000.000	9	900.000.000	9	900.000.000	9	900.000.000	9	900.000.000	
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				46.996.166.540		52.591.912.266		53.643.750.511		54.716.625.521		55.810.958.032	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang aman dan nyaman	Tingkat kemantapan jalan	-	33,13	46.996.166.540	39,85	52.591.912.266	46,56	53.643.750.511	53,28	54.716.625.521	60	55.810.958.032	
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				46.996.166.540		52.591.912.266		53.643.750.511		54.716.625.521		55.810.958.032	
Terjaminnya keberfungsian jaringan jalan secara menyeluruh di wilayah kabupaten.	Jumlah ruas jalan yangdibangun/ditingka tkan/direhabilitasi/dipel ihara (Ruas)	17	8		8		8		8		8		
	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang	2	2		2		2		2		2		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyelenggaraannya Diawasi (KM)												
	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	0	2		2		2		2		2		
	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala (Meter)	0	4		4		4		4		4		
	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)	2	2		2		3		2		3		
	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	1	1		1		1		1		1		
	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	18	18		21		24		23		25		
	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	2	2		2		2		2		2		
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	20	20		20		20		20		20		
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	1	1		1		1		1		1		
	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)		8		8		8,12		6		7,6		
	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)		1168,2		1168,2		1168,2		1168,2		1168,2		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	5	5		5		5		5		5		
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	4	4		4		4		2		4		
1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				1.840.266.573,77		1.848.675.192,15		983.951.764,23		951.664.923,77		1.200.000.000	
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	4	4	1.840.266.573,77	4	1.848.675.192,15	4	983.951.764,23	2	951.664.923,77	4	1.200.000.000	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	yang Disusun (Dokumen)												
1.03.10.2.01.0060 - Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa				1.490.266.573,77		1.648.675.192,15		983.951.764,23		1.402.934.524,77		2.000.000.000	
Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya (Km)	0	18	1.490.266.573,77	21	1.648.675.192,15	23	983.951.764,23	24	1.402.934.524,77	25	2.000.000.000	
1.03.10.2.01.0057 Penggantian Jembatan				3.190.266.573,77		3.298.675.192,15		2.583.951.764,23		2.852.934.524,77		6.000.000.000	
Tergantinya Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)		2	3.190.266.573,77	3	3.298.675.192,15	3	2.583.951.764,23	2	2.852.934.524,77	3	6,000,000,000	
1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan				890.266.573,77		2.948.675.192,15		2.527.194.572,23		2.502.934.524,77		2.500.000.000	
Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)		8	890.266.573,77	8	2.948.675.192,15	8,12	2.527.194.572,23	6	2.502.934.524,77	7,6	2.500.000.000	
1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan				23.362.967.654,77		26.157.809.960,15		36.293.086.532,23		34.488.549.874,30		29.410.958.032	
Terekonstruksinya Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (Km)	18	18	23.362.967.654,77	21	26.157.809.960,15	24	36.293.086.532,23	23	34.488.549.874,30	25	29.410.958.032	
1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan				1.390.266.573,77		1.448.675.192,15		583.951.764,23		1.002.934.524,77		900.000.000	
Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)		1	1.390.266.573,77	1	1.448.675.192,15	1	583.951.764,23	1	1.002.934.524,77	1	900.000.000	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.800.000.000	
Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	5	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.800.000.000	
1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan				1.290.266.573,77		1.348.675.192,15		483.951.764,23		902.934.524,77		400.000.000	
Terehabilitasinya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi (Jembatan)	2	2	1.290.266.573,77	2	1.348.675.192,15	2	483.951.764,23	2	902.934.524,77	2	400,000,000	
1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan				2.200.000.000		2.200.000.000		2.400.000.000		2.200.000.000		2.200.000.000	
Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	1	1	2.200.000.0000	1	2.200.000.000	1	2.400.000.000	1	2.200.000.000	1	2.200.000.000	
1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan				1.590.266.573,77		1.648.675.192,15		783.951.764,23		1.202.934.524,77		900.000.000	
Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (Km)	1.168,2	1.168,2	1.590.266.573,77	1.168,2	1.648.675.192,15	1.168,2	783.951.764,23	1.168,2	1.202.934.524,77	1.168, 2	900.000.000	
1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan				2.390.266.573,77		2.448.675.192,15		1.883.951.764,23		2.002.934.524,77		3.500.000.000	
Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	2	2	2.390.266.573,77	2	2.448.675.192,15	2	1.883.951.764,23	2	2.002.934.524,77	2	3.500.000.000	
1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan				3.690.266.573,77		3.748.675.192,15		2.883.951.764,23		3.302.934.524,77		3.000.000.000	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	20	20	3.690.266.573,77	20	3.748.675.192,15	20	2.883.951.764,23	20	3.302.934.524,77	20	3.000.000.000	
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				500.000.000		510.000.000		520.200.000		530.604.000		541.216.080	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi kompetensi (Angka)	310	100	500.000.000	100	510.000.000	100	520.200.000	100	530.604.000	100	541.216.080	
1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				250.000.000,00		255.000.000		260.100.000		265.302.000		270.608.040	
Meningkatnya kapasitas dan kompetensi tenaga kerja konstruksi terampil dalam mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan aman.	Jumlah pelatihan tenaga terampil konstruksi yang diselenggarakan (kegiatan)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	310	100		100		100	00	100		100		
1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis				250.000.000		255.000.000		260.100.000		265.302.000		270.608.040	
Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator,	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator.	310	100	250,000,000	100	255,000,000	100	260,100,000	100	265,302,000	100	270,608,040	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Teknisi atau Analis yang Dilatih (orang)												
1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				250.000.000		255.000.000		260.100.000		265.302.000		270.608.040	
Meningkatnya kepatuhan dan profesionalisme pelaku jasa konstruksi dalam melaksanakan kegiatan konstruksi sesuai regulasi dan standar teknis yang berlaku.	Persentase pelaku jasa konstruksi yang diawasi (Badan Usaha)		100		100		100		100		100		
	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	14	14		20		24		28		33		
1.03.11.2.04.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota				250.000.000		255.000.000		260.100.000		265.302.000		270.608.040	
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib	14	14	250.000.000	20	255.000.000	24	260.100.000	28	265.302.000	33	270.608.040	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)												
1.03.12 -PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				500,000,100		510,000,100		520,200,100		530,604,100		645,540,939	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase perizinan kegiatan pemanfaatan ruang (%)	0,09	0,12	500.000.000	0,16	510.000.000	0,20	520.200.000	0,24	530.604.000	0,28	645.539.939	
1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		500.000.000	
Meningkatnya legalitas dokumen tata ruang wilayah yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan	Jumlah dokumen RTRW/RDTR yang ditetapkan melalui Perkada (Dokumen)		1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	
	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
1.03.12.2.01.0005 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		150.000.000	
Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	150,000,000	
1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		150.000.000	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET	
			2026		2027		2028		2030		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000		
1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		150.000.000		
Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
	Persentase Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasiPemanfaat an ruang daerah kabupaten/kota			50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.12.2.03.0007 - Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang			1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Meningkatnya kepatuhan dan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang yang berlaku	Persentase usulan kesesuaian ruang pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW/RDTR		100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	
	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	196	200	50.000.000	200	50.000.000	200	50.000.000	200	50.000.000	200	50.000.000	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				50.000.000		60.000.000		70.200.000		80.604.000		95.539.939	
Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	196	200	50.000.000	200	60.000.000	200	70.200.000	200	80.604.000	200	95.539.939	
URUSAN PEMERINTAHAN													
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.167.615.840		8,330,968,157		8,497,587,520		8,667,539,271		8,840,890,056	
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian	100	100	8.167.615.840	100	8,330,968,157	100	8,497,587,520	100	8,667,539,271	100	8,840,890,056	
1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				187.354.000		187.354.000		187.354.000		187.354.000		187.354.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase realisasi program dan kegiatan terhadap target perencanaan tahunan	100	100		100		100		100		100		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan		1		1		1		1		1		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)												
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		4		4		4		4		4		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		2		2		2		2		2		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		4		4		4		4		4		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		4		3		3		3		3		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)		1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)		2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)		1		1		1		1		1		
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)		1		1		1		1		1		
1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				21,918,000		21,918,000		21,918,000		21,918,000		21,918,000	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)		4	21,918,000	3	21,918,000	3	21,918,000	3	21,918,000	3	21,918,000	
1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				23,506,000		23,506,000		23,506,000		23,506,000		23,506,000	
Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA--SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD (Dokumen)		1	23,506,000	1	23,506,000	1	23,506,000	1	23,506,000	1	23,506,000	
1.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD				23,506,000		23,506,000		23,506,000		23,506,000		23,506,000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD (Dokumen)	1	1	23,506,000	1	23,506,000	1	23,506,000	1	23,506,000	1	23,506,000	
1.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				21,506,000		21,506,000		21,506,000		21,506,000		21,506,000	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD (Dokumen)		2	21,506,000	2	21,506,000	2	21,506,000	2	21,506,000	2	21,506,000	
1.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				22,006,000		22,006,000		22,006,000		22,006,000		22,006,000	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD (Dokumen)		2	22,006,000	2	22,006,000	2	22,006,000	2	22,006,000	2	22,006,000	
1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				23,406,000		23,406,000		23,406,000		23,406,000		23,406,000	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan lappran hasil koordinsai penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)		4	23,406,000	4	23,406,000	4	23,406,000	4	23,406,000	4	23,406,000	
1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21,506,000		21,506,000		21,506,000		21,506,000		21,506,000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (Laporan)		4	21,506,000	4	21,506,000	4	21,506,000	4	21,506,000	4	21,506,000	
1.03.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
1.03.01.2.01.0009 - Pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terselenggaranya pengumpulan data statistik Statistik Sektoral Daerah	Jumlah data statistik Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
1.03.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.539.461.840		4.565.398.827		4.482.018.190		4.510.385.271		4.503.736.056	
Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen pertanggungjawaban keuangan (SPJ) yang sesuai ketentuan	100	100		100		100		100		100		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi		4		4		4		4		4		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)												
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		70		70		70		70		70		
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		2		2		2		2		2		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		12		12		12		12		12		
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		4		4		4		4		4		
1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.837.421.840		3.878.358.827		3.811.597.553		3.829.964.634		3.823.315.419	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang)		70	3.837.421.840	70	3.878.358.827	70	3.811.597.553	70	3.829.964.634	70	3.823.315.419	
1.03.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				617,040,000		617,040,000		617,040,000		617,040,000		617,040,000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi KeuanganSKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (dokumen)		12	617,040,000	12	617,040,000	12	617,040,000	12	617,040,000	12	617,040,000	
1.03.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKP	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	
1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				55.000.000		40.000.000		23.380.637		33.380.637		33.380.637	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	12	12	55.000.000	12	40.000.000	12	23.380.637	12	33.380.637	12	33.380.637	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)												
1.03.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
1.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD		4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	
1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				36.200.000		36.200.000		36.200.000		36.200.000		36.200.000	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan BMD perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan		100	36.200.000	100	36.200.000	100	36.200.000	100	36.200.000	100	36.200.000	
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		2		2		2		2		2		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		4		4		4		4		4		
1.03.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Tersedianya rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	
1.03.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				16,200,000		16,200,000		16,200,000		16,200,000		16,200,000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		12	16,200,000	12	16,200,000	12	16,200,000	12	16,200,000	12	16,200,000	
1.03.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	
Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah		100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	
	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)		12		12		12		12		12		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)		12		12		12		12		12		
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)		1		1		1		1		1		
	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)		50		50		50		50		50		
	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)		1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)		4		4		4		4		4		
1.03.01.2.04.0002 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
1.03.01.2.04.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)		4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	
1.03.01.2.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)		50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.0000	50	10.000.000	50	10.000.000	
1.03.01.2.04.0005 - Pengolahan Data Retribusi Daerah				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)		12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	
1.03.01.2.04.0006 - Penetapan Wajib Retribusi Daerah				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
1.03.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)		12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	
1.03.01.2.05 – Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				60.000.000		30.000.000		60.000.000		20.000.000		20.000.000	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase data ASN yang ter-update dan valid dalam sistem kepegawaian nasional	100	100	60.000.000	100	30.000.000	100	60.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	
1.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
1.03.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				50.000.0000		20.000.000		50.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	12	12	50.000.0000	12	20.000.000	12	50.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				584.600.000		363.600.000		513.600.000		493.600.000		493.600.000	
Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi yang mendukung pelayan birokrasi yang tertib dan efisien	100	100	584.600.000	100	363.600.000	100	513.600.000	100	493.600.000	100	493.600.000	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	30	30		30		30		30		30		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		4		4		4		4		4		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		240		240		240		240		240		
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		100		100		100		100		100		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		11		1		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		4		4		4		4		4		
1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				190.000.000		125.000.000		150.000.000		130.000.000		130.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1	1	190.000.000	1	125.000.000	1	150.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	
1.03.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				25.000.000		15.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		1	25.000.000	1	15.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				70.000.000		35.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)		4	70.000.000	4	35.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3,600,000		3,600,000		3,600,000		3,600,000		3,600,000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)		240	3,600,000	240	3,600,000	240	3,600,000	240	3,600,000	240	3,600,000	
1.03.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				25.000.000		15.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)		4	25.000.000	4	15.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				221.000.000		140.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	30	30	221.000.000	30	140.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	
1.03.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				25.000.000		15.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		100	25.000.000	100	15.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				25.000.000		15.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		1	25.000.000	1	15.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				800.000.000		1.718.405.330		1.788.415.330		2.000.000.000		2.300.000.000	
Tersusunnya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan BMD penunjang urusan yang terpenuhi	100	100	800.000.000	100	1.718.405.330	100	1.788.415.330	100	2.000.000.000	100	2.300.000.000	
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		0		0		0		0		0		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		5		5		5		5		5		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		1		1		1		1		1		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		1		1		1		1		1		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		2		1		1		1		1		
1.03.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0		0		0		0		0		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		0		0		0		0		0		
1.03.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				450.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		2	450.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150.000.000		95.000.000		95.000.000		60.000.000		60.000.000	
Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	2	5	150.000.000	5	95.000.000	5	95.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	
1.03.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		1.323.405.330		1.393.415.330		1.640.000.000		2.000.000.000	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		3	100.000.000	1	1.323.405.330	1	1.393.415.330	1	1.640.000.000	1	2.000.000.000	
1.03.01.2.08 -Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				680.000.000		680.000.000		680.000.000		680.000.000		680.000.000	
Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang tersedia dan berfungsi optimal	100	100	680.000.00	100	680.000.000	100	680.000.000	100	680.000.000	100	680.000.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		4		4		4		4		4		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		4		4		4		4		4		
1.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyura	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik				260.000.000		260.000.000		260.000.000		260.000.000		260.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Dava Airdan Listrik		12	260.000.000	12	260.000.000	12	260.000.000	12	260.000.000	12	260.000.000	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	yang Disediakan (laporan)												
1.03.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	
1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)		12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.220.000.000		690.000.000		690.000.000		680.000.000		500.000.000	
Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD yang dilaksanakan sesuai rencana kerja pemeliharaan	100	100	1.220.000.000	100	690.000.000	100	690.000.000	100	680.000.000	100	500.000.000	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)												
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)		9		9		9		9		9		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1		1		1		1		1		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		25		25		25		25		25		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	35	35		35		35		35		35		
1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0		0		0		0		0		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		0		0		0		0		0		
1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				340.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	35	35	340.000.000	35	140.000.000	35	140.000.000	35	140.000.000	35	140.000.000	
1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				400.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		110.000.000	
Teersedianya Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (unit)	9	9	400.000.000	9	200.000.000	9	200.000.000	9	200.000.000	9	110.000.000	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGITAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				80.000.000		50.000.000		50.000.000		40.000.000		40.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	25	25	80.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	40.000.000	25	40.000.000	
1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				400.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.00		210.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si (Unit)		1	400.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.00	1	210.000.000	



4.3. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030

Dalam rangka mendukung pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025–2030, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menetapkan sejumlah Sub Kegiatan Prioritas yang selaras dengan urusan wajib pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur strategis, serta penguatan daya dukung ruang dan lingkungan. Sub kegiatan prioritas ini mencerminkan fokus pada penyediaan layanan dasar, peningkatan konektivitas, serta penataan ruang yang berkelanjutan. Uraian dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:



TABEL 4.3
DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS
DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1.03.1.04.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang				
1	1.03.02-PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya Perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi		
			1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.02.2.01.0075 - Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.03.02.2.01.0078 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai	
			1.03.02.2.01.0108 - Rehabilitasi Unit Air Baku	
			1.03.02.2.01.0128 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	
			1.03.02.2.02-Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.02.2.02.0002 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	1.Program unggulan nomor 5
			1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1.Rakortek 2.Asta Cita 3.Program unggulan nomor 1 4.program unggulan nomor 5
			1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.Rakortek 2.Asta Cita 3.Program unggulan nomor 1 4.Program unggulan nomor 5
			1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
2	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum		



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
			1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.03.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	1.Program unggulan nomor 5
			1.03.03.2.01.0024 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			1.03.03.2.01.0025- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			1.03.03.2.01.0026-Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.SPM 2.Program unggulan nomor 2
			1.03.03.2.01.0027 - Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	
			1.03.03.2.01.0028- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.Rakortek 2.SPM 3.Program unggulan nomor 5
			1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			1.03.03.2.01.0030 - Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.03.2.01.0031 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			1.03.03.2.01.0032-Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.Rakortek 2.SPM
			1.03.03.2.01.0033 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	
			1.03.03.2.01.0034 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
3	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pengelolaan air limbah		
			1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.05.2.01.0031 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
			1.03.05.2.01.0038 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
			1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat	1.SPM 2.Program unggulan nomor 5
			1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
4	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan		
			1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.06.2.01.0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	
			1.03.06.2.01.0020 - Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan	
			1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
			1.03.06.2.01.0030 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	
5	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya kualitas bangunan gedung		
			1.03.08.2.01- Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
			1.03.08.2.01.0015 - Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.08.2.01.0016 - Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
			Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
6	1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata		
			1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.09.2.01.0010 - Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	1.Program unggulan nomor 1 2.Program unggulan nomor 8
			1.03.09.2.01.0012 - Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	
7	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang aman dan nyaman		
			1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
			1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
			1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
			1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan	
			1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan	1.Program unggulan nomor 1 2.Program unggulan nomor 5
			1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan	
			1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan	
			1.03.10.2.01.0057 - Penggantian Jembatan	
			1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan	
			1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan	1.Program unggulan nomor 1 2.Program unggulan no mor 5
			1.03.10.2.01.0060 - Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	
			1.03.10.2.01.0061 - Pemeliharaan Berkala Jembatan	
			1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan	
			1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan	1.Program unggulan nomor 1 2.Program unggulan nomor 5
8	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi		
			1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
			1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
			1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
			1.03.11.2.04.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
9	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang		
			1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.01.0005 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	1.Asta Cita 2.Rakortek 3.Program unggulan nomor 8
			1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1.Asta Cita 2.Rakortek 3.Program unggulan nomor 8
			1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.03.0007 - Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	
			1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1.Program unggulan nomor 8



4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan strategis suatu perangkat daerah selama periode perencanaan strategis, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi untuk tahun 2025–2030. Penyusunan IKU mengacu pada prinsip *cascading* dari tujuan, sasaran, program, hingga kegiatan, serta selaras dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah.

Adapaun tujuan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. Menyediakan tolak ukur kinerja strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi,
2. Menjadi dasar evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi dalam mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah,
3. Menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja,
4. Menyelaraskan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi dengan arah pembangunan nasional dan daerah khususnya bidang infrastruktur dasar dan tata ruang.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi Tahun 2025 - 2030 dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini :



TABEL 4.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN SIGI
TAHUN 2025 - 2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA						Ket
				2025	2026	2027	2028	2030	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	%	26,41	26,67	26,94	27,21	27,48	27,76	28,03	
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangkabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigas	%	69,27	69,96	70,66	71,37	72,08	72,80	73,53	
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	74,82	75,57	76,32	77,09	77,86	78,64	79,42	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	82,01	82,83	83,66	84,49	85,34	86,19	87,06	
5	Rasio Ketaatan Terhadap RTRW	Angka	0,08	0,0808	0.0816	0,0824	0,0832	0,0841	0,0849	



4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi Tahun 2025–2030. IKK disusun berdasarkan pendekatan *cascading* dari tujuan dan sasaran strategis, serta diturunkan secara langsung ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas.

IKK menjadi elemen penting dalam sistem akuntabilitas kinerja, karena menjadi dasar pengukuran efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PUTR dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah.

Adapun tujuan penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu :

1. Memberikan ukuran kinerja yang spesifik, relevan, dan terukur pada setiap sasaran perangkat daerah;
2. Memastikan keterkaitan antara sasaran, program, dan kegiatan dengan target pembangunan daerah;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perjanjian Kinerja (PK), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
4. Mendorong efektivitas pengelolaan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*).

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini :



TABEL 4.5
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN SIGI
TAHUN 2025 – 2029

NO	INDIKATOR	STATUS	BASELINE 2024	TARGET KINERJA						KET
				2025	2026	2027	2028	2030	2030	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	%	26,41	26,67	26,94	27,21	27,48	27,76	28,03	
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	69,27	69,96	70,66	71,37	72,08	72,80	73,53	
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	74,82	75,57	76,32	77,09	77,86	78,64	79,42	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	82,01	82,83	83,66	84,49	85,34	86,19	87,06	
5	Rasio Ketaatan Terhadap RTRW	Angka	-	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	
6	Persentase perizinan kegiatan pemanfaatan ruang	%	0.09	0.09	0,12	0,16	0,20	0,24	0,28	
7	Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	Ha	151	152,51	154,04	155,58	157,13	158,7	160,29	
8	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	23,02	23,25	23,48	23,71	23,95	24,19	24,43	
9	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	%	69,66	70,36	71,06	71,77	72,49	73,22	73,95	



NO	INDIKATOR	STATUS	BASELINE 2024	TARGET KINERJA						KET
				2025	2026	2027	2028	2030	2030	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
11	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	%	6,75	6,82	6,89	6,96	7,03	7,10	7,17	
12	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	%	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	100	100	100	100	100	100	100	



Selain indikator kinerja kunci dan indikator kinerja utama yang diampuh oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi juga mengampuh indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Pertauran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan indikator kinerja kunci LPPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan Evaluasi LPPD . Indikator SPM dan inidikator LPPD dan Indikator Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi Tahun 2025 - 2030 dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini :



TABEL 4.6
INDIKATOR SPM DAN INDIKATOR LPPD
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN SIGI
TAHUN 2025 – 2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA						KET
				2025	2026	2027	2028	2030	2030	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
INDIKATOR SPM										
1	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	1.231	1.243	1.307	1.320	1.333	1.346	1.359	
2	Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	50	50	65	65	65	65	65	
INDIKATOR LPPD										
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	-	-	-	-	-	-	-	
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	-	-	-	-	-	-	-	
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	69,27	69,96	70,65	71,35	72,06	72,78	73,50	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	74,82	75,56	76,31	77,07	77,84	78,62	79,41	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA						KET
				2025	2026	2027	2028	2030	2030	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	82,01	82,83	83,65	84,48	85,32	86,17	87,03	
6	Rasio kepatuhan PBG/IMB Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	26.41	26,67	26,93	27,19	27,46	27,73	28,00	
9	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	100	



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman operasional dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Sigi selama periode lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi 2025–2029 serta mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun secara terukur dan terintegrasi, guna memastikan terwujudnya infrastruktur yang andal, tertata, dan berkelanjutan demi mendukung kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sigi. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat bergantung pada komitmen, koordinasi, dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik perangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dunia usaha, maupun masyarakat.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat terlaksana secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga setiap langkah pembangunan yang dilakukan mampu memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Evaluasi dan penyesuaian akan dilakukan secara berkala agar pelaksanaan Renstra senantiasa relevan dengan perkembangan kebutuhan daerah, kebijakan nasional, dan dinamika lingkungan strategis.

Akhirnya, semoga dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi pedoman yang kokoh dan bermanfaat bagi semua pihak dalam mewujudkan pembangunan



infrastruktur yang mendukung tata ruang yang tertib, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan di Kabupaten Sigi.



PUTR
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG